Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora
Univesitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Infrastruktur Politik Menuju Pilpres 2024 Dalam Konstruksi Media Sosial

Rambe Kamarul Zaman[1], Misnan[2]

[1,2]Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957
Jl. Moch. Kahfi II No.33, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 13550
Email korespondensi*: cakmisnankece@gmail.com*

Abstract *- The purpose of this research is to show the construction of the political infrastructure of the Golkar Party in building the leadership of Airlangga Hartarto as a presidential candidate for the Republic of Indonesia in 2024. The subjects of the research are the 1957 Kosgoro cadres who are the members of the Whatsapp PPK Kosgoro 57 group for the 2021-2026 term of service. The research approach uses a constructivist with qualitative descriptive method. The results show that the political infrastructure of the Golkar Party with a national platform has a strategic positioning in all circles. Airlangga, as a statesman, has strongly built his leadership capacity and capability in the momentum of overcoming COVID-19 and the decisions of reviving national economic. Another infrastructure is that Golkar's interest group. They are practitioners, businessmen, intellectuals who are loyal to Pancasila. Similarly, the pressure group, which was initiated from the campus, through the socialization of the Tri Dharma Kosgoro: Devotion, People, Solidarity. The infrastructure that is still felt weak is the political media.*
Keywords*: political infrastructure, social media construction, presidential candidate 2024*

Abstrak - Tujuan penelitian adalah ingin menunjukkan konstruksi infrastruktur politik Partai Golkar dalam membangun ketokohan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden RI 2024. Subjek penelitian adalah para kader Kosgoro 1957 yang tergabung dalam grub Whatsapp PPK Kosgoro 57 masa bakti 2021-2026. Pendekatan penelitian menggunakan konstruktivis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur politik Partai Golkar dengan *platform* kebangsaan memiliki *positioning* strategis di semua kalangan. Airlangga sebagai negarawan, secara kuat terbangun kapasistas dan kapabilitas kepempinannya dalam momentum penanggulangan COVID-19 serta keputusan-keputusan pembangkitan ekonomi yang konsisten. Infrastruktur lain adalah kelompok kepentingan yang dimiliki Golkar merupakan praktisi, pengusaha, intelektual yang setia pada Pancasila. Demikian pula kelompok penekan, yang sudah dirintis dari kampus, melalui sosialisasi Tri Dharma Kosgoro: Pengabdian, Kerakyatan, Solidaritas. Adapun infrastruktur yang masih dirasakan lemah adalah media politik.
Kata kunci: infrastruktur politik, konstruksi media sosial, kandidat presiden 2024

Pendahuluan

Komunikasi lintas batas atau bahkan tidak terbatas, kini bukan persoalan hirarki lagi. Grub dalam media sosial, khususnya *Whatsapp* telah mampu menembus batas yang dimaksud. Pejabat pemerintah tertinggi dapat berkomunikasi secara langsung dengan kalangan masyarakat bawah tanpa harus melalui birokrasi dan protokoler khusus sebagaimana era konvensional di masa lalu. Komunikasi yang tadinya multilapis, kini menjadi pertukaran pesan interpersonal saja. Dengan

demikian, jarak komunikasi itu menjadi sangat dekat tanpa sekat.

Pembicaraan politik tidak lagi menjadi konsumsi politisi, tetapi juga oleh siapapun, akibat akses informasi politik demikian intensif dan masif. Untuk itu, kelompok masyarakat atau komunitas sosial sangat dimungkinkan mengonstruksi apapun secara rasional meskipun terkadang irasional. Di dalam "grub" tersebut juga terjadi dinamika, dalam bentuk perdebatan bahkan fokus grub diskusi yang terus berkembang dari hari ke hari, atau bahkan dari jam ke jam sesuai dengan membanjirnya informasi dari berbagai *platform* media.

Di lain pihak, Pilpres 2024 yang relatif masih jauh, dalam berbagai ranah, kini justru dianggap demikian dekat, sehingga publik juga sudah berpikir tentang pasangan ideal, pasangan yang harus diabaikan sampai pada tokoh-tokoh alternatif yang terus dikembangkan dengan berbagai tanggapan. Artinya, dalam persoalan Pilpres, dukungan rakyat terhadap proses politik lebih tertuju pada figur, dibanding *platform* partai. Bagaimanapun, demikian gencarnya pemberitaan konsolidasi, koalisi, ataupun konspirasi sampai korupsi, semakin meningkatkan kesadaran publik bahwa berbicara tentang tokoh, jauh lebih menarik dibanding *platform* partai. Partai *bisa jadi* tidak menjanjikan apa-apa, tetapi figur sangat berperan dalam kebijakan ekonomi, politik, sosial. Hal itu bisa terlihat dari fenomena terkini pemerintahan, yang banyak tergantung dari kapasitas dan kapabilitas Presiden Jokowi, meskipun klaim sebagai "petugas partai" kerapkali dilontarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati.

Tidak dapat dipungkiri bahwa stigma yang menyatakan jika partai politik hanya sebagai "panggung" bagi aktor-aktor di dalamnya, tidaklah berlebihan. Pilpres 2024 agaknya menjadi pelajaran politik yang sangat berharga bagi masyarakat, setelah mereka terpolarisasi dalam *cebong* dan *kampret* pada Pemilu 2019. Sentimen yang terlahir masih terlalu dalam untuk terhapus begitu saja, meskipun para calon presiden yang membuat situasi polar itu, kini sudah menyatu, sama-sama menduduki posisi strategis, yang sama sekali meniadakan nuansa perseteruan. Agaknya, Pilpres 2024 sudah mendewasakan publik untuk tidak mengonstruksi apapun dalam posisi kawan versus lawan. Dari sinilah, pembicaraan tokoh-tokoh alternatif menjadi kian menarik, apalagi posisi *incumbent* yang memang sudah harus tergantikan.

Pada sisi lain, di antara banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta kroniisme, tokoh yang masih dianggap "bersih" tentu menjadi idola *netizen*, demikian pula bagi kalangan milenial terdidik, wacana tersebut kemudian juga berkembang sampai pada terminologi *leadership*. Untuk soal yang satu ini, sangat terkait dengan *impression management*, yang sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi politik. Meskipun komunikasi politik dipahami oleh sebagian orang hanya sebagai "pekerjaan" politisi yang tidak merepresentasikan apapun, namun berdasarkan animo masyarakat yang terus *memasang-masangkan* antartokoh, menjadi tanda bahwa sesungguhnya masyarakat masih berharap dan tidak kehilangan ketertarikan terhadap teka-teki perjalanan kepemimpinan bangsa ke depan.

Di lain pihak, formasi kepemimpinan baru tentu membangkitkan harapan baru. Impian masyarakat tentang *corporate governance* yang profesional dari jajaran tertinggi sampai pemerintahan terendah, sebenarnya menjadi isu yang timbul tenggelam. Bagi sebagian masyarakat, wacana lahirnya figur pemberantas korupsi, terus menjadi dambaan sekaligus paralel dengan keputusasaan. Fenonema pandemi COVID-19 yang masih juga diwarnai dengan banyaknya kasus korupsi, tentunya semakin meyakinkan rakyat, bahwa arus atas dan

arus bawah dalam bernegara berada pada jarak yang sangat jauh. Kesejahteraan para pemimpin sangat tidak sebanding dengan porsi kinerja. Di sisi lain, rakyat seakan terus menerima imbas beban, akibat anggaran operasional para pejabat yang mewakilinya. Laporan kekayaan para pejabat yang sangat fantastis, kerapkali melahirkan sikap antipati golongan masyarakat tertentu. Terkait dengan fenomena ini, tentunya komunikasi politik semestinya ditunjukkan dalam kondisi yang "menyejukkan", agar motivasi rakyat tetap terbangun, simpati dan empati sebagai modal strategis pembangun citra tokoh dapat dimaksimalkan. Kesadaran inilah yang kemudian berkaitan dengan kompetensi seorang tokoh dalam mengelola gaya komunikasi politiknya.

Mengerucut pada lingkup yang lebih sempit, yakni elemen-elemen politik, yang antara lain adalah partai politik dan para politisi di dalamnya. Dalam lingkar kecil itupun selalu terjadi dinamika dan dialektis. Berbicara prestasi politik Partai Golkar, tidak terlepas dari prestasi politik organisasi massa Kosgoro 1957, ormas pendiri Partai Golkar yang mumpuni. Organisasi ini telah mampu menyumbangkan pikiran-pikiran strategis sekaligus implementasi efektif dalam merealisasikan program-program politik partai berlambang beringin itu.

Dalam dinamika historisnya, Kosgoro 1957 pernah dilanda kemelut perpecahan. Berkat kedewasaan para pucuk pimpinan masing-masing, konflik tersebut dapat diatasi. Semua fihak dapat dipersatukan kembali, sehingga Kosgoro 1957 berhasil menjadi solid. Eksistensi Kosgoro 1957 tidak terlepas dari figur besar A.R. Agung Laksono yang kini masih menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Jabatan ini tentu merupakan kehormatan bagi Kosgoro 1957, terlebih lagi Agung Laksono terpilih juga sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar hingga sekarang. Nama Kosgoro 1957 juga dilambungkan oleh kader lainnya, yakni Airlangga Hartarto, yang sekarang dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Tidak berhenti sampai di situ, kader Kosgoro 1957 lainnya, Zaenudin Amali juga dipercaya sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Masih ada lagi, Jefry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Hal ini memiliki makna bahwa Kosgoro 1957 memiliki porsi terbesar dalam "memainkan peran" politik di *panggung depan*, yakni panggung politik Partai Golkar, dibandingkan organisasi serumpun, misalnya MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia), dan lain-lain.

Berdasarkan penggambaran tersebut, maka topik "Infrastruktur Politik Menuju Pilpres 2024 dalam Konstruksi Media Sosial" memiliki korelasi momentum dan lokus yang menurut peneliti sangat manarik. Media sosial yang dimaksud adalah grub *WhatsApp* PPK Kosgoro57 masa bakti 2021 – 2026. Inilah yang menjadi batasan objek penelitian, percakapan-percakapan politik antarkader, yang di dalamnya juga terdapat beberapa pejabat aktif, yang secara langsung masih memiliki peran terhadap jalannya pemerintahan serta Pilpres 2024 sangat dialektis. Adapun batasan konstruksi adalah ketokohan dan kepemimpinan Airlangga Hartarto dan eskalasi konstruksi yang semakin meningkat di bulan Juni 2021, akibat keputusan dan kebijakan strategis negara, khususnya ekonomi dan penanggulangan pandemi COVID-19. Dengan demikian, batasan analisis juga dibatasi pada percakapan (*chat*) pada bulan Juni 2021 pada grub *WhatsApp* PPK Kosgoro57 masa bakti 2021 – 2026.

Adapun dasar teori yang digunakan adalah komunikasi politik. Menurut Damsar (2013: 207) dan (Larasati, 2018), komunikasi politik merupakan proses

pemaknaan terhadap kekuasaan (*power*), kemenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict and conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Komunikasi politik berperan menyambungkan semua bagian dari sistem politik, sehingga aspirasi dan kepentingan tersebut dikonversikan menjadi kebijakan. Pemilu adalah pasar politik tempat individu/masyarakat melakukan kontrak sosial antara partai politik dan pemilih. Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (Fauzi, 2018: 63 – 78).

Selanjutnya, keberagaman kepentingan, konflik, dan kekuasaan merupakan tiga hal pokok dalam dunia politik. Kepentingan menjadi beragam karena pada kenyataannya masyarakat pada suatu negara sangatlah beragam. Beragam kepentingan dalam struktur dan interaksi sosial bisa menimbulkan konflik kepentingan. Di sisi lain, sistem dan struktur sosial sendiri membutuhkan keteraturan, agar tidak menimbulkan kekakacauan. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuasaan yang terlegitimasi agar memiliki otoritas dan kewenangan untuk membangun keteraturan sistem dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya. Oleh karena itu, berpolitik tidak lain adalah pertempuran kepentingan. Pemenang dalam pertarungan kepentingan akan mendapatkan legitimasi untuk berkuasa dan menentukan arah serta kebijakan negara.

Adapun partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas*, secara ideal berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimatif. Dengan demikian, partai politik adalah institusi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kepentingan politik masyarakat (Mawazi R., Mei 2017)

Hambatan komunikasi politik adalah sosialisasi. Pesan tidak dapat diterima dalam satu kali proses, tetapi memerlukan dialog-dialog lanjutan. Pembaharuan dan terobosan besar yang direncanakan pemerintah, merupakan agenda besar, (Napitupulu, Raja H, 07 Jan 2021) yang tentunya harus dilegitimasikan, diinstitusionalisasikan dan disosialisasikan.

Kerangka Teori

Konstruksi Realitas

Teori konstruksi sosial diperkenalkan oleh Peter L. Berger serta Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1996). Di bukunya, dia mendeskripsikan proses sosial melalui tindakan serta interaksi, dimana individu menciptakan secara kontinyu suatu realitas yang dimiliki dan dialami beserta secara subjektif. (Tamburaka, 2012). Berger serta Luckmann mengungkapkan realitas sosial menggunakan memisahkan pemahaman ‘kenyataan dan pengetahuan’ realitas diartikan menjadi kualitas yang terdapat pada pada empiris yg diakui menjadi mempunyai keberadaan (being) yg tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan diartikan menjadi ketidakpastian bahwa realitas- realitas itu nyata (real) dan mempunyai ciri spesifik (Bungin, 2008).

Berger dan Luckmann berkata terjadi dialektika antara individu membangun rakyat serta masyarakat membangun individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi (Tamburaka, 2012). 1) Eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan proses ketika sebuah produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam

masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu, sehingga produk sosial tersebut menjadi suatu bagian penting di dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar. 2) Objektivikasi. Tahapan dimana produk sosial berada pada proses institusionalisasi atau pelembagaan 3) Internalisasi. Mengacu proses pemahaman atau penafsiran langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna.

Media Massa dan Media Sosial

Media sosial adalah satu set teknologi yg berbasis web broadcast dimana memungkinkan demokratisasi atas isi, menyampaikan kesempatan kepada pengguna yg muncul sebagai konsumen dari isi sebagai *publisher* (Scott & Jacka, 2011). Lanjut berdasarkan Shirky media sosial serta perangkat lunak sosial adalah indera buat menaikkan kemampuan pengguna buat membuatkan (to share), bekerja sama (to cooperate) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yg semuanya berada diluar kerangka institusional juga organisasi. Adanya keragaman makna ihwal keberadaan media sosial, yg terungkap adalah a) media sosial dapat menjadi wahana buat eksistensi diri yg merajuk asal publisher, menampung pemikiran, melepaskan pikiran, hiburan atau kepuasan, serta menciptakan jejaring sosial, b) Selain itu media sosial juga sebagai sarana yang sangat efektif buat sharing, publikasi karya, membuat komunitas, serta wahana edukasi pemikiran cara lain (kritis), c) media umum dimaknai lebih menyampaikan kebebasan dan melepaskan narasumber dari ikatan nilai atau norma budaya, d) dialogis dan mempertajam pemikiran atau terbiasa menerima kritik, itu dapat terjadi karena media sosial dimaknai sebagai kawasan berdebat, berargumen, mendapatkan respon atau apresiasi berasal pengguna lain (Maryani, E., & Arifin, 2012).

Kemunculan media sosial menjadi ruang baru buat berinteraksi, memudahkan rakyat serta menaikkan rasa ingin tahu akan global yg lebih luas. media sosial juga dijadikan sebagai sarana buat memenuhi kebutuhan batin yang bersifat positif juga negatif yang tidak bisa mereka lakukan di dunia nyata. Internet serta perkembangan teknologi isu memiliki dampak baik postif serta negative, galat satunya perilaku menyimpang serta merusak pada kehidupan remaja yg membuahkan mereka menjadi korban secara online (Dowdell, 2011;(Staksrud et al., 2013). Berdasarkan kutipan tadi timbul konstruksi baru dalam perkembangan penggunaan media sosial yaitu remaja yang menggunakan internet dan media sosial telah membuka celah dalam diri mereka sendiri buat menjadi korban bullying, pemerkosaan, serta perilaku menyimpang lainnya. Hal ini dapat terjadi sebab beberapa factor, yaitu a) media social dikelola secara eksklusif yg tidak mempunyai forum control, b) tidak mempunyai gate keeper yg menyaring isi atau konten yang akan diposting.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa media massa merupakan gambaran mengenai alat komunikasi yang meliputi massa yang luas. Media massa jua merupakan wahana manusia untuk tahu realitas social yang mana dituntut buat memiliki keseuaian menggunakan realitas social yang ada dan sahih-benar terjadi, tanpa imbuhan serta tanpa pengurangan. Hal ini yg menyebabkan media massa dianggap bersifat netral. namun, di nyatanya dibalik itu media waktu ini ditunggangi atas kepentingan, perseteruan, dan dapat dijadikan menjadi indera kekuasaan serta arena pergulatan ideologi.

Untuk menyajikan sebuah informasi, media massa membutuhkan seseorang jurnalis yg bertugas buat mencari, mengumpulkan, serta mengolah isu yang nantinya akan disebarkan pada rakyat. Singkatnya tugas jurnalis yakni menyampaikan liputan serta/atau pendapat

yang mengandung keterangan, memberikan kebenaran dan keadilan, menyebutkan konflik yang hangat dan mendidik masyarakat.

Informasi atau gosip yg ditayangkan di media massa diliput oleh seseorang yg memang berprofesi menjadi jurnalis serta telah melalui gatekeeper dan juga dikontrol oleh banyak sekali lembaga penyiaran. oleh karena itu mengapa media massa sedikit lamban dalam menyajikan gosip.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah konstruktivis dengan metode deskriptif. Konstruktivis yang dimaksud didasarkan atas teori konstruksi sosial realitas dari Berger dan Luckman, yang mencakup eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, termasuk di dalamnya legitimasi, institusionalisasi dan sosialisasi. Jadi, objek penelitian adalah *chat whatsapp* selama bulan Juni 2021, yang dilihat dari sisi konstruksi sosial realitas model Berger dan Luckman.

Konstruksi realitas Berger dan Luckman dalam praktik komunikasi merupakan proses simultan sebagai berikut: a) Eksternalisasi, oleh karena individu ingin eksis, terlibat, kompromistis, menyesuaikan *positioning* dengan luaran; b) Objektivasi, oleh karena individu berusaha menghasilkan produksi sosial tertentu sebagai akibat dari interaksi dengan individu lain, serta berusaha mencapai idealisme dalam ranah intersubjektif; c) Internalisasi, oleh karena individu kemudian terus mengidentifikasi dirinya dengan luaran-luaran yang telah *terobjektivasi* atau bahkan *terinstitu-sionalisasi*.

Berger dan Luckmann menyatakan bahwa ‘manusia adalah makhluk konservatif yang memiliki kecenderungan meripitasi tindakan dan cenderung mencari keselarasan dan keamanan dalam hidup’. Dengan demikian, tiap realitas dianggap sebagai proses *institusionalisasi*, *legitimasi*, dan *sosialisasi*. Semua proses ini akan menjadi prosedur pembahasan hasil penelitian. Dalam hal ini, pada objek penelitian didapatkan representasi-representasi dari konsep konstruksi realitas model Berger dan Luckman, terutama terhadap seorang figur dan korelasinya dalam kontestasi Pilpres 2024.

Adapun penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006: 72). Fenomena alamiah dari Pilpres, yakni perubahan kepemimpinan akibat proses pergantian yang harus diterima dan dijalani, dilanjutkan dengan infrastruktur politik sebagai fenomena buatan para aktor dengan berbagai ragam kapasitasnya, dideskripsikan kemudian diklasifikasikan dalam bahasa-bahasa konstruktif, sesuai dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Eksternalisasi

Fenomena Pemilu 2024 yang melahirkan banyak sekali spekulasi, diikuti oleh banyaknya figur alternatif, sangat berpengaruh pada divergensi pemikiran masyarakat. Sayangnya, di tengah merebaknya divergensi tersebut, PDI Perjuangan yang selalu terdepan dalam survei, terdepan pula mengemukakan konsep Pilpres yang diharapkan hanya akan diikuti oleh dua pasang calon (*OkeZone.com*, Sabtu, 29 Mei 2021: 17.00 WIB). Bagi para komunikator politik PPK Kosgoro 1957 masa bakti 2021 – 2026, hal ini tentu menciptakan berbagai enigma. Terlebih lagi wacana yang menguat terhadap pencalonan Puan Maharani juga terasa makin gencar. Artinya, sama sekali

tidak menyinggung Partai Golkar yang merupakan representasi Kosgoro 1957 dalam Pilpres 2024.

Selanjutnya diperkuat oleh makin eratnya hubungan antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Keduanya selalu teratas dalam survei, sehingga memunculkan anggapan bahwa Partai Golkar tidak sedang diperhitungkan. Pembacaan terhadap proyek pengadaan alutsista Departemen Pertahanan dan perolehan gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan tentunya menjadi penguat bahwa kristalisasi politik akan mengerucut pada dua kekuatan besar partai politik yang unggul versi beberapa survei. Namun demikian, kondisi eksternal ini tidak lantas mencipatakan anggapan "kecemasan politik" mengingat rentang waktu 2024 yang masih relatif jauh. Partai Golkar lebih memilih konstruksi kepemimpinan Airlangga Hartarto yang tengah berkonsentrasi penuh terhadap penanggulangan COVID-19 serta paralel dengan penyelamatan ekonomi nasional.

Meskipun Airlangga juga dikritik, antara lain oleh salah seorang Ekonom, bahwa langkah penanggulangan COVID-19 tidak seharusnya paralel dengan penanggulangan krisis ekonomi, tetapi secara cepat figur Airlangga sebagai Menko Perekonomian mampu menjawab dengan langkah-langkah strategis, antara lain dengan gencarnya vaksinasi, bantuan UMKM, sejumlah kebijakan perbaikan birokrasi investasi, diikuti pemantauan pandemi COVID-19 secara masif. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa kepercayaan pemerintah terhadap kinerja dan upaya Airlangga tidak bergeser. Inilah konstruksi eksternal yang juga banyak "ditangkap" oleh para kader sebagai "tangga kepantasan" bahwa Airlangga dapat dijadikan tokoh alternatif dalam Pilpres 2024.

Di lain pihak, tidak seperti Pilpres sebelumnya, calon-calon alternatif, relatif muda, memang banyak tampil. Nama-nama populer, seperti Prabowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, serta beberapa tokoh lain, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono terus mendapatkan tempat di hati publik, melalui konstruksi sosial media massa. Di antara tokoh-tokoh tersebut tentunya secara struktural, Anies Baswedan sangat diperhatikan oleh kader Kosgoro 1957 mengingat peta politik yang harus menjadikan Partai Golkar dapat independen dapat diwujudkan, karena Anies bukan calon yang banyak disinggung oleh PDI Perjuangan. Secara tersirat, konstruksi kedewasaan politik Partai Golkar sangat terbangun. Loyalitas pada pemerintahan Jokowi sangat konsisten, tidak terpengaruh oleh konstruksi yang dibangun PDI Perjuangan, sehingga komunikasi politik antara Partai Golkar dengan PDI Perjuangan juga tetap kondusif, solid dalam mendukung kebijakan pemerintahan, terutama dalam menangani pandemi COVID-19.

Selain itu, terdapat pula pengamatan terhadap "konflik" dalam tubuh PDI perjuangan, yakni konflik antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani juga menjadi pembicaraan beberapa hari. Meskipun diliput secara luas oleh media, tetapi bagi kader Kosgoro 1957 hal itu dianggap sebagai dinamika politik semata. Tidak terlalu didiskusikan, apakah hal tersebut bagian strategi politik atau konflik yang memang benar-benar terjadi secara mendadak. Hal ini tentu mengingat Pilpres 2024 yang masih jauh dan konstruksi capres yang akan terus berdinamika, sebagaimana pemilihan umum sebelumnya. Melihat hasil survei, para kader Kosgoro 1957 juga tidak terlalu menanggapi *ranking* Partai Golkar sebagai hal preseden buruk, tetapi lebih banyak ditanggapi sebagai kekayaan evaluatif yang jika benar dapat dijadikan masukan untuk perbaikan, dan jika salah, juga harus ditindaklanjuti sebagai pemahaman *positioning* partai.

Partai Golkar memang tampil ke depan dalam berbagai kebijakan kontroversial, antara lain *omnibus law* dan penanganan pandemi COVID-19. Di satu sisi memperlihatkan bahwa ketokohan Airlangga Hartarto semakin teruji, tidak saja sebagai negarawan, tetapi juga penguasaan lapangan dalam hal penyelamatan ekonomi; meskipun masih ada pro dan kontra, tetapi pasca dilakukannya serangkaian sosialisasi, dinamika penerimaan publik relatif stabil.

Di luar itu, terdapat momentum penguat dari sisi profil, yakni silsilah Airlangga yang ternyata masih keturunan darah biru, kerajaan Jawa di masa lampau (Trah Mangkunegara). Bagi masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, hal semacam ini cukup mempengaruhi aura kepemimpinan. Konstruksi kegiatan *nyekar* ke makam leluhur tersebut tentu akan menjadi poin profil Airlangga yang memang pantas untuk maju sebagai capres 2024. Dalam bingkai kultural, konstruksi genealogis ini cukup strategis menjadi konten pesan dalam komunikasi politik pada masanya.

Objektivasi

Oleh karena wacana eskalasi Pilpres 2024 bersamaan dengan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang masih juga belum menunjukkan *ending*, maka konstruksi yang dipilih oleh para kader adalah kepemimpinan Airlangga dalam mengatasi semua krisis. Dukungan maksimal dari kader Kosgoro 1957 adalah kegiatan vaksinasi serta sejumlah bantuan kemanusiaan yang demikian gencar dan terus dibahas dari opini satu tokoh ke arah tokoh yang lain. Untuk itu, kontribusi nyata dari semua kader justru menjadi hal yang terus didiskusikan sampai akhir Juni, terlebih lagi kasus lonjakan penularan COVID-19 yang menjadi sangat mencemaskan. Konstruksi kepercayaan dan dukungan terhadap kepiawaian Airlangga dalam mengambil kebijakan terus didukung.

Legitimasi

Jajaran kader Kosgoro 1957 secara umum menyuarakan adanya alternatif-alternatif pemecahan masalah. Hal ini ditunjukkan pula oleh Ketua Umum Kosgoro 1957 yang secara aktif langsung meninjau lapangan dalam kegiatan vaksinasi dan sejumlah bantuan. Meskipun patut disadari bersama bahwa hal ini juga menjadi bagian dari strategi politik secara implisit, namun dalam perbincangan para kader justru konseptis yang terbangun adalah perihal azas kebangsaan dalam slogan Tri Dharma Kosgoro: *Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas* dan implementasinya dalam masa pandemi COVID-19, antara lain dengan dukungan maksimal pada kebijakan-kebijakan pemerintah disertai literasi secara interpersonal sampai nasional.

Terlepas dari persoalan yang dimaksud, para kader mengakui bahwa hanya komunikasi politik yang tepatlah yang akan mengantarkan Partai Golkar pada "kemenangan". Di antara perencanaan komunikasi politik tersebut adalah konsolidasi, sehingga menghadapi Pilpres 2024, perihal konsolidasi partai di semua wilayah merupakan tantangan dan tuntutan yang tidak dapat ditunda. Oleh karena itu dalam *chat WhatsApp* banyak sekali ditampilkan gambar-gambar yang merepresentasikan proses konsolidasi antarpimpinan dan antarkader di berbagai daerah. Konstruksi yang timbul yakni pemecahan masalah-masalah infrastruktur politik Partai Golkar, antara lain dinamika kepemimpinan di berbagai daerah akibat Pilkada, terobosan-terobosan sosial yang dapat dilakukan, agar kelompok kepentingan dan kelompok penekan dapat dimaksimalkan aspek sinergisnya. Kelompok kepentingan berkaitan dengan pembiayaan dan kelompok penekan berkaitan dengan *trust* politis, bahwa Partai Golkar selalu memilih solusi-solusi terbaik

dalam mengakomodasi inspirasi dan aspirasi rakyat.

Masih berkaitan dengan infrastruktur politik, yakni perihal kelompok kepentingan. Yang termasuk dalam komponen ini antara lain: organisasi keagamaan, pedagang, pebisnis, pengusaha, organisasi buruh, organisasi massa, komunitas adat, budaya ataupun UMKM sampai pada sosialita, yang pada intinya merupakan jaringan politis, akibat peran kapital yang dimilikinya, pengaruh yang diakibatkannya, ataupun sumberdaya manusia di dalamnya. Kelompok infrastruktur ini pada prinsipnya mampu memberikan dukungan legitimatif terhadap pemerintah. Ketokohan Airlangga banyak berperan dalam mengafiliasi komponen yang dimaksud. Sebagai menko Perekonomian, melalui slogan "ekonomi bangkit" memerlukan banyak dukungan dari kelompok kepentingan.

Lebih lanjut tentang kelompok penekan. Kelompok ini antara lain banyak diperankan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi kepemudaan (AMPI misalnya), serta kalangan terpelajar, yakni komunitas kampus/mahasiswa. Salah satu kebanggaan PPK Kosgoro 1957 adalah kampus Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 yang berada di Lenteng Agung. Dengan dibangunnya Graha Kosgoro di kampus tersebut, maka konstruksi Kosgoro 1957 dan Partai Golkar yang sangat peduli pada pendidikan dapat dilegitimasi. Pada institusi inilah 19 Pesan Moral Kosgoro dapat dijadikan sebagai daya tarik penjaringan kader. Bagaimanapun, kampus merupakan lokus paling strategis dalam menjaring kader, meskipun manajemen pendidikan menuntut independensi. Tentunya kesadaran ini sudah sangat dipahami oleh para kader, bahwa penjaringan kader harus didasarkan pada kesadaran yang sama sekali tidak disertai oleh tekanan apapun.

Beralih pada konstruksi nasional, bahwa melalui budaya kebangsaan dan kerakyatan, melalui figur Airlangga, seakan-akan semua pihak diajak belajar untuk menahan diri dalam berkomentar, baik terhadap persoalan kepuasan dan ketidakpuasan. Pemerintah dan publik hendaknya tidak menyampaikan narasi-narasi provokatif yang memicu perdebatan sia-sia. Sebaliknya, gaya komunikasi politik Airlangga lebih dominan berupa pembuktian bahwa pemerintah melalui karya pelayanannya bagi negeri, selalu didasarkan pada refleksi implementatif, misalnya tentang KIP (Kartu Indonesia Pintar), stimulus UMKM dan fasilitas perawatan penderita COVID-19 serta alternatif pembatasan sosial kegiatan masyarakat.

Airlangga juga dinilai mampu meningkatkan literasi publik terkait program pembangunan, sehingga berimplikasi pada peningkatan partisipasi publik. Bahwa pembangunan bangsa ditujukan untuk seluruh masyarakat, karenanya peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan. Kesadaran ini yang selalu dibawa oleh Airlangga dalam memformulasikan kebijakan-kebijakannya. Hasilnya adalah *omnibus law* yang didukung secara mayoritas oleh dewan legislatif sekaligus menjadi solusi percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, melalui dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Pada mulanya memang melahirkan kontroversial, namun seiring waktu, implementasi *omnibus law* banyak dimaklumi sebagai jalan tepat.

Konstruksi lain adalah penguatan sistem pemerintahan Indonesia, yakni sistem presidensial. Artinya, struktur dan fungsi politik seorang presiden, tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Meskipun disadari bahwa sistem multipartai sebenarnya lebih condong pada sistem parlementer, namun sistem multipartai di Indonesia memiliki

karakter yang sama sekali berbeda dengan hal serupa di negara lain. Partai pemenang pemilu hasil pemilihan legislatif belum tentu menjadi pemenang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Meskipun secara teoritis tidak banyak disampaikan dalam *chat*, tetapi konsep presidensial yang "berbeda" tersebut secara implisit banyak dikonstruksi sebagai formulasi demokrasi yang sesuai dengan Indonesia.

Kritik yang banyak dilontarkan oleh para kader adalah hasil pengamatan mereka terhadap wacana demokrasi representatif. Demokrasi tetap harus merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, oleh karena itu, Kosgoro 1957 dan Partai Golkar masih berkeyakinan bahwa penguasaan kebijakan publik sebagai tanggung jawab politik terhadap konstituen merupakan aspek normatif guna mewujudkan demokrasi representatif (*representative democracy*). Demokrasi tersebut tidak diperbolehkan mengarah pada konsep kekuasaan yang dijalankan secara pragmatis, hanya berorientasi pada kepentingan personal, ideologis dan primordial. **(**Hakim, Abdul dan Redi Panuju, Oktober 2019). Sebagai kumpulan dari tokoh-tokoh plural, Kosgoro 1957 dan Partai Golkar banyak menyatakan ketidaksetujuan terhadap praktik-praktik politis yang mengarah pada salah satu elemen tersebut.

Legitimasi yang dibangun pada kahirnya mengerucut pada figur Airlangga yang sama sekali tidak tampak sebagai aktor ambisius dalam memperoleh kepentingan, kekuasaan dan konflik. Dalam banyak kesempatan, tampilnya Airlangga sebagai wakil pemerintah sama sekali tidak mengundang potensi konflik. Pro kontra tentang hasil kebijakan memang ada, dan hal tersebut sulit dihindari, tetapi agregasi politik di depan presiden, Airlangga justru selalu mampu, tampil secara meyakinkan sebagai figur pemersatu. Modal ini memang disadari tidak secara instan melahirkan efek kausalitas, bahwa Airlangga merupakan pilihan bulat sebagai calon presiden, tetapi harus melalui proses "seleksi alam" yang masih panjang.

Institusionalisasi

Dorongan untuk menginstitusionalisasi Airlangga sebagai capres 2024 terus menguat di sepanjang perbincangan. Pertimbangan-pertimbangan yang dapat diidentifikasi antara lain adalah: *Pertama*, penyesuaian diri, yakni figur yang mudah menyesuaikan diri, terutama kemampuan adaptif dalam menyambut era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0. Kemampuan personal dalam menyesuaikan diri tersebut sudah teruji, antara lain tampak pada (a) usia kepemimpinan, yaitu sejak periode Presiden Jokowi dalam dua periode kepemimpinannya, serta dukungan kuat organisasi massa Kosgoro 1957; (b) usia organisasi Partai Golkar, yaitu *track record* suatu organisasi yang terbukti mampu mengatasi masalah suksesi dengan luwes. *Kedua*, kesederhanaan konsep pemikiran Airlangga, yang selalu mudah diikuti dan konkret tahap-tahapnya. *Ketiga*, otonomi, Airlangga tidak tergantung pada kelompok sosial dan metode perilaku tertentu. Dan *keempat*, kemampuan dalam mengelola organisasi internal, hubungan antarpartai dan peran sinergis dalam sistem politik. *Kelima*, Airlangga memiliki kesalehan struktural dan kesalehan kultural. Maksudnya adalah kepatuhan Airlangga pada proses dan prosedur organisasi serta menjunjung tinggi etika komunikasi, sekaligus merepresentasikan kesantunan dan keramahan bangsa Timur.

Sosialisasi

Infrastruktur politik secara simultan menjadi materi yang terus mengkristal pada figur Airlangga sebagai calon presiden 2024. Meskipun langkah komunikasi masih sebatas secara internal, tetapi para kader memiliki kesepakatan untuk kemudian merencanakan dan merumuskannya dalam bentuk strategi komunikasi pemsaran

politik. Sayangnya, konstruksi ini belum sampai pada konsensus secara massal dan terbuka. Para kader sama sekali belum menyuarakan keyakinan politis ini kepada pihak eksternal, selain anggota grub saja. Hal ini tidak luput dari tokoh-tokoh tertinggi Kosgoro 1957 dan Partai Golkar yang sama sekali belum mengeluarkan pernyataan politis, berkaitan dengan pencalonan ataupun menyambut aspirasi melalui tindak lanjut tertentu.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono dan Ketua Umum Kosgoro 1957, Dave Laksono, serta Airlangga Hartarto sendiri selaku Ketua Umum Partai Golkar terkesan tidak ikut dalam pembicaraan. Meskipun mereka mengetahui dinamika pemikiran para kader dalam *obrolan* grub, demikian intensif, tetapi para tokoh yang disebutkan seakan tidak tertarik untuk menanggapinya lebih jauh. Airlangga justru menyatakan dengan tegas bahwa konsentrasi kepemimpinannya masih terfokus pada pemulihan ekonomi dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Artinya, para pimpinan menganggap bahwa persoalan Pilpres 2024 belum penting untuk dikristalisasi.

Secara sementara, didapatkan gambaran bahwa gaya komunikasi politik berlangsung dalam dua *layer*, yakni arus atas dan arus bawah, yakni para kader yang terus menyuarakan pencalonan Airlangga sebagai capres dan sikap Airlangga sendiri di tengah pandemi COVID-19. Dikotomi arus ini ternyata justru menambah keyakinan arus bawah, bahwa Airlangga merupakan figur yang sesuai memimpin Indonesia. Optimisme kader terhadap kemampuan pemerintah untuk keluar dari krisis akan segera terwujud, dan figur Airlangga semakin mendapatkan tempat untuk maju dalam kontestasi politik 2024. Pandemi akan menjadi pembuka jalan kepahaman publik terhadap kapasitas dan kapabilitas Airlangga Hartarto sebagai capres. Gaya "diam" Airlangga yang tidak emosional responsif dalam menanggapi dukungan terhadapnya, justru menjadi hal positif yang dianggap sangat konstruktif terhadap gaya komunikasi politik ideal dari seorang figur pemimpin.

Internalisasi

Berdasarkan proses-proses konstruksi tersebut, proses internalisasi mengarah pada konsolidasi. Oleh karena itu sepanjang masa pandemi, konsolidasi dalam bentuk kunjungan para pimpinan ormas Kosgoro 1957 dan Partai Golkar demikian masif, dari satu daerah ke daerah yang lain. Bagaimanapun semua kader meyakini bahwa infrastruktur politik adalah kelompok kepentingan yang sudah terbangun sejak lama dan tersebar di seluruh Indonesia. Komunikasi interpersonal menjadi alat perekat hubungan antara pusat dan daerah maupun cabang di bawahnya, agar *trust* kelompok kepentingan terus dapat dibangun sinergitasnya.

Oleh karena percakapan dalam *chat* lebih bersifat *obrolan*, maka perihal teoritis sebagai representasi suprastruktur politik, yakni fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif sudah tidak lagi banyak disinggung, bahkan sangat minor, berbeda dengan infrastruktur politik. Secara umum, infrastruktur politik terdiri dari: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media komunikasi politik.

Media komunikasi politik yang merupakan bagian kekurangan Airlangga, jika dibandingkan dengan Hari Tanoe misalnya, tidak banyak dijadikan bahan *obrolan* juga. Berbeda dengan infrastruktur lainnya, yakni tokoh politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan partai politik. Pembicaraan tokoh politik yang paling dominan adalah Agung Laksono sebagai tokoh lintas era, sejak Orde Baru sampai sekarang yang kemudian dilanjutkan dengan putra biologis sekaligus ideologis beliau, Dave Laksono, yang belum lama menggantikan posisi ayahandanya sebagai Ketua Umum Kosgoro 1957.

Berbeda dengan perbincangan eksternal, konstruksi para kader juga tidak banyak menyoroti persoalan peran media massa yang mayoritas dianggap banyak mengambil peran untuk menyuarakan permasalahan yang diinginkan pemerintah. Namun demikian, *obrolan* tentang *hoax* dan *hate speech* dalam beberapa kesempatan disinggung. Secara tersirat, figur Airlangga memang tidak terlalu tertarik tampil dalam media televisi kecuali dalam banyak webinar. Para kader memahami bahwa siapa yang berkuasa akan mendapat "penghargaan" luar biasa di media. Agaknya, perihal media komunikasi politik merupakan bagian yang belum menarik perhatian, dikarenakan kepopuleran Airlangga Hartarto yang sudah sangat masif dikonstruksi oleh berbagai media massa.

Internalisasi juga sampai pada konstruksi Partai Golkar yang harus terbangun secara independen. Bahwa sebagai partai politik, Partai Golkar memiliki kewajiban untuk selalu menyuarakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat (*Suara Golkar Suara Rakyat*). Meskipun Partai Golkar selalu mendukung penguasa, atau pemerintah terpilih, namun orientasi partai politik yang berfokus hanya demi kekuasaan, baik di legislatif maupun eksekutif bukan motif yang disepakati. Dalam hal adanya partai politik yang semula rival dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden dan akhirnya merapat ke penguasa dan menduduki jabatan, justru menjadi persoalan yang tidak menarik perhatian para kader. Seakan para kader sudah sedemikian paham bahwa karakter politik adalah “tidak ada lawan abadi”, apalagi jika partai politik yang dimaksud sebenarnya memiliki rumpun atau sifat bawaan yang sama, utamanya karakter kebangsaan, seperti Partai Golkar.

Simpulan

Kontestasi politik Pilpres 2024 masih relatif jauh, namun para kader menyadari bahwa konsolidasi antarelemen infrastruktur politik harus terbangun sejak dini. Golongan Karya sebagai partai politik yang memiliki *high bargaining position*, melalui kepemimpinan Airlangga semakin yakin terhadap *positioning*nya. Eskalasi dari keyakinan ini kemudian meluas sampai pada kelompok kepentingan dan kelompok penekan menuju kristalisasi pencalonan Airlangga sebagai capres 2024.

Dalam proses konstruksi, Airlangga dirasakan sangat kompetitif dibandingkan calon-calon alternatif yang sudah populer. Di antara infrastruktur yang masih belum begitu kuat adalah media komunikasi politik, yakni media massa yang mampu melakukan fungsi “politik komunikasi” dan amplifikasi ketokohan Airlangga. Namun demikian, banyaknya variabel positif lain yang dimiliki Airlangga, pada waktu-waktu mendatang diyakini akan mampu meraih simpati dan empati cerdas dari publik.

Legitimasi Partai Golkar sebagai perwujudan demokrasi representatif dan Kosgoro 1957 yang memiliki kader terpercaya dalam berbagai peran pemerintahan, kiranya menjadi wajar jika kemudian menginstitusionalisasi Airlangga Hartarto sebagai capres 2024. Modal politik sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan jabatan pemerintahan sebagai Menko Perekonomian ditambah sisi genealogis kultural (mitos trah Mangkunegara) sangat konstruktif dijadikan strategi komunikasi politik pada waktunya.

Daftar Pustaka

Berger dan Luckman Berger, Peter L. & Thomas Luckmannn. 1991. *The Social Construction of Reality*. England: Penguin Book.

Bungin, Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan

Keputusan KOnsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Kencana: Jakarta

Damsar. (2013), *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana. Hlm. 207

Dowdell, E.B., et.al. 2011. Original research: online social networking patterns among adolescents, young adults, and sexual offenders. American Journal of Nursing, Vol.111 (7), 28-36.

Fauzi. (2018). Komunikasi Politik Calon Legislatif dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Pekommas*. Vol. 3 No. 1, 63–78. STIKes Muhammadiyah Lhok-seumawe.

Hakim, Abdul dan Redi Panuju. (2019). Strategi Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Surabaya Pada Pemilu Legislatif 2019. *Sosiologi Reflektif*. Volume 14, No. 1. Universitas dr Soetomo Surabaya.

Larasati, Suryanef. (2018). Strategi Partai Amanat Nasional dalam Memenangkan Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi di Dapil II Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman). *Journal of Civic Education.* Volume 1 No. 4. Universitas Negeri Padang.

Maryani, E., & Arifin, H. S. (2012). Konstruksi Identitas Melalui Media Sosial. *Journal of Communication Studies*, *1*((1)), 1–22.

Mawazi, Abd. Rahman. (2017). *In Right*: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 6, No. 2.

Napitupulu, Raja H. (07 Jan 2021). Omnibus Law dan Komunikasi Publik Konsultan Komunikasi Independen. *Opini E-paper Media Indonesia*.

Scott, P. R., & Jacka, J. M. (2011). *Auditing social media: A governance and risk guide*. John Wiley & Sons.

Staksrud, E., Ólafsson, K., & Livingstone, S. (2013). Does the use of social networking sites increase children's risk of harm? *Computers in Human Behavior*, *29*(1), 40–50

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 72.

Tamburaka, Apriadi. 2013. Agenda Setting Media Massa. Depok: PT Rajagrafindo Persada

Utama, Felldy. (29 Mei 2021). "PDIP Inginkan Pilpres 2024 Diikuti 2 Pasangan Calon Saja, Ini Alasannya". *OkeZone.com*. *https://nasional.okezone.com*.